

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama-agama di dunia sudah ada dan berkembang seiring perkembangan manusia, kebanyakan disebut sebagai suatu sistem kepercayaan. Di dunia timur permulaan agama dikatakan ada dalam bangsa-bangsa arab terdahulu, seperti dalam kisah-kisah terdahulu penyembahan terhadap barhala, menyembah binatang bahkan menyembah malaikat. Kisah-kisah tersebut dijelaskan dalam kitab suci Al Qur'an.¹

Dijelaskan pula walaupun hakikatnya mereka menyembah berhala ataupun yang lainnya tapi tetap perihal kepercayaan yang menciptakan mereka adalah Tuhan.² Dalam proses penyarian Tuhan atau dalam hal ini menjadikan sebuah manusia yang beragama, dalam agama yang menyimpan segala bentuk norma yang menjadikan manusia baik dan menghormati Tuhannya. Menyinggung peran agama dalam pembentukan norma yang berarti sebuah keteraturan manusia, di dunia timur khususnya dalam hal ini agama Islam yang dianggap mewakili sebagian norma dalam segala kehidupan termasuk negara (dauwlah).³

Pembahasan tersebut di atas melingkupi dunia Timur, sedangkan dalam dunia barat, Yunani menjadi titik tolak dari peradaban barat yang di dalamnya mencakup kemajuan dalam sistem kehidupan dan keagamaan di Barat.⁴ Bagi bangsa Yunani

¹ Hamka. *Sejarah Umat Islam*. (Jakarta: Gema insani, 2016). Hal 54.

² *Ibid.*

³ Mohammad Harjun, "Pemikiran Islam tentang hubungan Agama dan Negara". *Jurnal adabiyah*, 11 (2), tahun 2011. Hal 183.

⁴ Muhammad Junaidi, *Ilmu Negara*. (Malang: Setara press, 2016). Hal 25.

agama yang dikenalkan melalui dewa-dewa mitologi, yang dianggapnya memiliki bentuk yang indah, agung, dan memiliki kekuatan yang berbeda dari makhluk lain. Namun hal itu tidak menjadikan dewa memuaskan hasrat keingintahuan dan kemajuan bangsa Yunani. Atas dasar agama yang tidak diterapkan dalam kaidah hidup bangsa Yunani kemudian berfikir secara logis terkait keteraturan yang mereka anggap tidak ada dalam agama, tepatnya pada abad ke-5 SM di Athena pemikiran tentang hukum dan negara mulai dirancang. Selain faktor agama yang menjadikan Yunani memiliki gagasan tersebut antara lain adalah karena faktor geografi.⁵

Istilah negara dalam bangsa Yunani diawali dengan kata negara kota (Polis), yang diawali dengan pendirian benteng di bukit, bertujuan sebagai tempat berlindung yang aman seiring banyaknya masyarakat yang menggabungkan diri mereka demi sebuah keamanan maka benteng tersebut diperluas. Sistem negara yang dikenalkan mencakup satu kota saja.⁶

Praktek kehidupan masyarakat Yunani kuno dalam negara kota (*city state*) telah menunjukkan struktur sebuah negara dengan berbagai bentuknya sebelum muncul tokoh-tokoh pemikir kenegaraan. Sistem pemerintahan di Athena telah memungkinkan masalah kenegaraan menjadi diskusi publik dalam keseharian masyarakatnya. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan negara-negara modern saat ini, namun negara kota Yunani kuno telah menunjukkan struktur pemerintahan negara berdasarkan kondisi masyarakat pada saat itu. Masyarakat pada masa itu dibagi

⁵ Ibid. Hal 26

⁶ Ibid. Hal 27

menjadi tiga kelas utama, yaitu budak (*slaves*), orang asing (*foreign or metic*), dan warga negara (*citizens*). Budak dan orang asing tidak dapat ikut ambil bagian dalam kehidupan politik. Status kewarganegaraan diperoleh karena ikatan darah dari masing-masing suku atau kelompok (*parishes*).⁷

Dalam hal ini dapat diketahui bahwa antara dunia Timur dan barat memiliki pandangan agama dan negara yang berbeda. Dalam dunia Timur yang didominasi oleh masyarakat Islam kecenderungan agama dan negara mempunyai implikasi, sedangkan dalam dunia Barat agama dan negara dipisahkan oleh sistem. Untuk menjelaskan gagasan agama dan negara, dengan banyak perseptif tokoh-tokoh yang memiliki gagasan tersebut antara lain tokoh modern Islam yaitu Ali Abdul Raziq dan Muhammad Husein Haikal terkait dengan Islam yang mengantur sistem ketatanegaraan. Di lingkup Indonesia gagasan agama dan negara juga disampaikan oleh tokoh-tokoh Indonesia antara lain Azyumadi azra,⁸ Din Syamsyudin dengan konsep integralnya, Abdurahman Wahid, Nurcholis Majid, Buya Hamka. Dari beberapa tokoh di atas penulis ingin mengkaji lebih jauh terkait pandangan Buya Hamka tentang agama dan negara.

Hal-hal terkait agama dan negara salah satunya dijelaskan dalam tafsir Al Ahzar miliknya. Dalam tafsir tersebut secara garis besar Buya Hamka menganalogikan bahwa agama akan terus ada dan satu sama lainnya akan terus berebut penganutnya dalam hal ini nasrani dan yahudi yang juga ingin menjadikan pemeluk Islam

⁷ George H. Sabine, *A History of Political Theory, Third Edition*, (New York-Chicago-San Fransisko-Toronto-London: Holt, Rinehart And Winston, 1961), hal. 4.

⁸ Mohammad Harjun. *Op, cit.* Hal 183.

khususnya menjadi penganut agama mereka.⁹ Semua ahli sejarah tahu Nabi Muhammad s.a.w. dengan turunnya wahyu Al – Qur'an mendirikan sebuah Negara yang berdaulat di atas kehidupan berkabilah yang sangat kecil, dan ingin meluas menggabungkan kabilah – kabilah menjadi satu ummat. Bahkan ada beberapa riwayat menjelaskan orang Yahudi sendiripun meminta permasalahan mereka ingin diputuskan berdasarkan hukum dari Rosulullah sendiri, meskipun mereka tidak memeluk Agama Islam.

Kebanyakan para toko berpendapat bahwa Agama dan negara itu adalah sesuatu yang terpisah, salah satunya adalah pandangan kaum sekuler memisahkan dan membedakan antara agama dan negara. Dalam paham ini, tidak ada hubungan antara sistim kenegaraan dengan agama. Negara adalah urusan hubungan manusia dengan manusia lain, atau urusan dunia. Sedangkan agama adalah hubungan manusia dengan Tuhan. Sedangkan Buya Hamka mengatakan bahwa Agama dan negara itu adalah kesatuan, maka menarik untuk diteliti lebih lanjut Dengan demikian penulis mengambil judul **“Gagasan Agama dan Negara Menurut Haji Abdul Malik Karim Amrullah (Buya Hamka)”**.

B. Rumusan Masalah

Bagian ini dimaksudkan memberikan penjelasan tentang ruang lingkup untuk memfokuskan penelitian, sehingga peneliti memiliki acuan yang jelas ketika melakukan penelitian dan memberikan batasan ruang lingkup yang akan diteliti¹⁰. Peneliti secara umum berusaha untuk mengetahui terkait Konsep Agama

⁹ Hamka. Tafsir Al – Azhar. (singapura: Pustaka Nasional, 1962). Hal. 285.

¹⁰ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah upaya mendukung penggunaan penelitian Kualitatif dalam berbagai disiplin ilmu*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2019), hal. 115.

dan Negara menurut Haji Abdul Karim Amrullah (Buya Hamka). Untuk memudahkan pembahasan penulis mengarahkan tulisan ini dengan rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana gagasan mengenai Agama dan Negara menurut Haji Abdul Malik Karim Amrullah (Buya Hamka)?
2. Bagaimana hubungan Agama dan Negara menurut Haji Abdul Malik Karim Amrullah (Buya Hamka)?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini merupakan target yang hendak dicapai oleh peneliti melalui serangkaian aktivitas penelitian, karena segala yang diusahakan memiliki tujuan tertentu yang sesuai dengan permasalahannya. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Gagasan mengenai Agama dan Negara menurut Haji Abdul Karim Amrullah (Buya Hamka).
2. Untuk Mengetahui hubungan Agama dan Negara menurut Haji Abdul Karim Amrullah (Buya Hamka).

D. Ruang Lingkup

Dalam penelitian ini penulis membatasi ruang lingkup pembahasannya mengenai Gagasan Agama dan Negara Menurut Haji Abdul Malik Karim Amrullah (Buya Hamka), terdapat batasan-batasan kajian diantaranya:

1. Penelitian berfokus pada pemikiran tokoh Buya Hamka. Kendati lahir di daerah Minangkabau, Sumatra Barat. Namun, Buya Hamka menghabiskan waktunya hingga wafat di Jakarta. Karena itu penelitian ini dibatasi dalam lingkup Jakarta.

2. Waktu penelitian dimulai saat Buya Hamka lahir tahun 1908 sampai wafatnya tahun 1981.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah peninjauan kembali pustaka-pustaka terkait yang berfungsi di antaranya untuk mengetahui manfaat penelitian sebelumnya, menghindari duplikasi dan memberikan masalah penelitian. Penulis tidak banyak menemukan sumber yang berkaitan dengan tema yaitu tentang Konsep Agama dan Negara menurut Haji Abdul Karim Amrullah (Buya Hamka), namun penulis menemukan beberapa sumber yang dapat dijadikan sumber rujukan, diantaranya adalah :

1. Skripsi yang di susun oleh Hanhan Moch Hary Ramdany dengan judul: Konsep Al-Ummah Al-Wahidah Menurut Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar. Menurutnya Islam merupakan ajaran yang diturunkan kepada manusia untuk dijadikan dasar dan pedoman hidup di dunia. Dimana seluruh aspek kehidupan manusia diatur di dalamnya, baik sebagai hamba Allah, individu atau anggota masyarakat.

Adapun untuk persamaan dari penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai pemikiran Buya Hamka khususnya dalam hal kereraturan masyarakat atau umat. Sedangkan perbedaannya penelitian ini lebih berfokus pada kesatuan umat dan keteraturannya berdasarkan gagasan agama dan negara yang dicanangkan Buya Hamka.

2. Skripsi yang disusun oleh Anggi Latifah dengan judul: Penafsiran Islam Kaffah (dalam kajian pemikiran hamka).

Sebagian orang memahami Islam kāffah sebagai pelaksanaan ajaran-ajaran Islam secara totalitas. Kurangnya memahami hakikat syariat dan penerapannya memicu banyaknya perdebatan dan kekhawatiran bagi Islam fundamentalis. Terlebih dengan konteks di Indonesia saat ini yang kerap mengkhawatirkan keutuhan dan kesatuan bangsa dengan sebab beberapa perdebatan mengenai kedudukan hukum Islam dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dengan hukum Islam dalam Alquran. Hal inilah yang menjadikan penulis bergerak untuk mengangkat pembahasan ini serta ingin mengetahui kalangan Islam di Indonesia dalam memahami sebuah konsep Islam kāffah.

Persamaan dari penelitian ini dan skripsi tersebut adalah sama membahas dari sudut pandang keislaman. Sedangkan untuk perbedaannya adalah jika skripsi tersebut lebih berfokus pada pembahasan Islam secara khusus dan penelitian ini lebih menggunakan sudut pandang Islam untuk menjelaskan mengenai gagasan agama dan negara.

3. Skripsi yang disusun oleh Sandhika Pramana Putra dengan judul :“Tanggung Jawab Ulama Terhadap Pemerintah Dalam Kisah Para Nabi Perspektif Buya Hamka”, Menurutnya Dari penjelasan Buya Hamka terkait kisah dari beberapa Nabi yang berhadapan dengan pemerintah di atas, terdapat beberapa tanggung jawab ulama yang ditunjukkan oleh kisah tersebut, yaitu bertanggung jawab menegakkan kebenaran atas kezaliman penguasa, bertanggung jawab menjadi penguasa dan penegak keadilan hukum, dan bertanggung jawab langsung terhadap pemerintah, seperti menjabat suatu tugas.

Fokus penelitian ini sama-sama membahas mengenai pemikiran atau pandangan dari Buya Hamka. Sedangkan perbedaannya pada skripsi tersebut membahas mengenai tanggung jawab ulama dalam pemerintahan dan pada penelitian ini fokusnya adalah gagasan Buya Hamka mengenai agama dan negara.

4. Jurnal yang disusun oleh Moh Dahlan “Hubungan Agama dan Negara di Indonesia”, Volume 14, Nomor 1, Juni 2014 menurutnya hubungan antara agama dan negara mengalami proses yang dinamis mulai dari tipologi formalistik hingga tipologi sekularistik. Sedangkan relasi agama dan negara yang dibangun Nabi saw memiliki kecenderungan inklusif dan substantif. Dari tipologi tersebut, hubungan antara agama dan negara yang perlu dibangun berdasarkan tipologi simbiotik ataupun dinamis-dialektis. Secara konstitusional, agama dan negara berjalan dinamis-dialektis, sehingga pelebagaan substansi norma agama Islam dalam tata kehidupan berbangsa dan bernegara tidak bisa dilakukan dengan cara inkosntitusional, tetapi harus melalui proses konstitusional, berdasarkan Pancasila dan UUD-NRI 1945.

Persamaan dari penelitian tersebut dan penelitian ini membahas tentang konsep agama dan negara dari sudut pandang Indonesia termasuk buya Hamka. Namun hal yang membedakan dari keduanya adalah penelitian ini merujuk pada satu tokoh yaitu Buya Hamka, sedangkan penelitian tersebut lebih pada sudut pandang konstitusional di Indonesia.

F. Kerangka Konseptual

Pengertian agama dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya *tidak kacau*, diambil dari dua suku kata *a* berarti *tidak* dan *gama* berarti *kacau*. Secara lengkapnya ialah peraturan yang mengatur manusia agar tidak kacau. Menurut maknanya, kata agama dapat disamakan dengan kata *religion* (Inggris), *religie* (Belanda), atau berasal dari bahasa latin *religio* yaitu dari akar kata *religare* yang berarti *meningkat*. Dalam bahasa Arab dikenal dengan kata “*dien*”.

“*Ad-Dien*” dalam bahasa Arab mengandung berbagai arti, yaitu *al-Mulka* (kerajaan), *al-Khidmat* (pelayanan), *al-Izz* (kejayaan), *adz-Dzull* (kehinaan), *al-Ikraah* (pemaksaan), *al-Ihsaan* (kebajikan), *Al-Aadat* (kebiasaan), *al-Ibaadat* (pengabdian), *al-Qahr was Shulthaaan* (kekuasaan dan pemerintahan), *al-Tadzallul wal Khudhuu'* (tunduk dan patuh). *Ad-Dien* ini bersifat umum, artinya tidak ditujukan pada salah satu agama tertentu karena merupakan nama untuk setiap kepercayaan yang ada di dunia ini.¹¹ Dalam Kamus Bahasa Indonesia, agama berarti ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungan.

Negara adalah pengikat umat manusia dan memiliki kekuasaan untuk memerintah dan memaksa sesuai dengan sistem hukum. Kata *Staat* (Negara) berasal dari terjemahan bahasa asing, seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Pertama *Staat* bahasa

¹¹ Muhammad Nandang Sunandar, “Konsep Agama dan Sistem Pemerintahan Dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Mizan*, Vol. (2) (2017).

Belanda yang artinya negara. Kedua *State* bahasa Inggris yang artinya negara. Ketiga *E''tat* bahasa Perancis artinya negara. Kata *staat* (*state, e''tat*) tersebut diambil dari bahasa latin yaitu status atau statum artinya menaruh dalam keadaan berdiri, membuat berdiri, menempatkan. Secara terminologi, negara diartikan sebagai organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang memiliki cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam satu kawasan dan mempunyai pemerintah yang berdaulat.

Agama dan Negara mempunyai suatu relevansi, dapat dilihat banyaknya persoalan agama dalam suatu negeri yang berbeda paham dan pandangan terkait Tuhan dan segala prakteknya, maka disana Negara sebagai lembaga pemersatu dari macam-macam paham keagamaan tersebut artinya dapat disebut sebagai hakim sekaligus mediator dari keragaman keagamaan tersebut.

Dalam penelitian kali ini terkait gagasan agama dan negara menurut Buya Hamka mengacuh pada sistem Islam. Dalam hal ini Hamka menjelaskan bahwa sedari awal kedatangan Islam tersebut sudah membawa aturan untuk hidup di dunia dan akhirat manusia, artinya dapat ditarik satu pemahaman bahwa hamka menyebut agama adalah suatu negara itu sendiri dan negara adalah suatu agama itu sendiri dengan tidak ada pemisahan didalamnya.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian dapat diartikan sebagai alat bagi peneliti untuk mencari jawaban tiap permasalahan yang diteliti. Karena berorientasi sebagai alat maka harus disesuaikan dengan penelitian apa yang kita ambil agar tidak menyusahakan proses penelitiannya.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu metode yang orientasinya berupa kata-kata manusia baik yang sudah ditulis maupun sumber lisan.¹²

Dalam pengertian menurut Straus dan Corbin, semua data dalam penelitian kualitatif tidak didapatkan dari perhitungan statistik yang biasanya terdapat pada metode penelitian kuantitatif walaupun sebagian penelitian ini juga terdapat angka-angka.¹³ Untuk itu, langkah-langkah penelitian ini akan terbagi ke dalam empat tahapan, yaitu, heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi.

1. Metode heuristik (pengumpulan sumber)

Tahap pertama adalah heuristik atau mencari sumber. Heuristik merupakan keterampilan untuk mengumpulkan sumber. Heuristic yang berasal dari bahasa Yunani yaitu heurishen, artinya memperoleh. Menurut G J. Renier, heuristic adalah suatu teknik, suatu seni, dan bukan suatu ilmu. Oleh karena itu, heuristic tidak mempunyai peraturan-peraturan umum.¹⁴

Peneliti menggunakan sumber sejarah dapat berupa bukti yang ditinggalkan manusia yang menunjukkan segala aktifitasnya di masa lampau baik berupa peninggalan-peninggalan bendawi maupun catatan-catatan naskah.¹⁵ Tahapan ini berawal pada seluruh proses pencarian dan penemuan sumber yang dibutuhkan. Proses ini akan sangat tergantung

¹² Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Depok: Rajawali Pers, 2019). hal 17.

¹³ *Ibid.* hal 13.

¹⁴ Dudung Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*, (Yogyakarta: Ombak, 2011), hal.104.

¹⁵ Prof. A. Daliman, *Metode penelitian sejarah*, Ombak, Yogyakarta, 2012, hal.

pada pengetahuan dan wawasan peneliti tentang sumber yang dibutuhkan dan oleh keterampilan teknis peneliti dalam penelusuran sumber.

Secara umum, sumber penelitian sejarah terbagi pada dua macam yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Hal ini dilakukan untuk menguji kebenaran dan kredibilitas sumber tersebut terhadap suatu peristiwa tertentu. Dalam pencarian sumber penulis melakukan langkah-langkah heuristik yaitu dengan mencari sumber primer dan sekunder.

a. Sumber Primer

Sumber primer merupakan sumber yang didapat melalui saksi mata atau ditulis pada saat peristiwa itu terjadi, dapat berupa dokumen atau orang.¹⁶ Sumber primer yang didapat penulis diantaranya adalah “*Sejarah Umat Islam*” yang ditulis prof. Dr. Hamka, “*Pra-kenabian Hingga Islam di Nusantara*” yang dibuat dan ditandatangani Buya Hamka, serta buku “*Islam Revolusi dan Ideologi*” yang menggambarkan Agama dan Negara itu satu kesatuan tidak dapat dipisah, dan buku tersebut ditulis Buya Hamka terkait pikiran-pikirannya dalam bidang Agama dan kenegaraan.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder dapat diartikan sebagai sumber kedua atau orang yang menulis ataupun orang yang tidak terlibat dalam kejadian tersebut.¹⁷ Di antara sumber sekunder yang didapat adalah buku “*Tafsir al-azhar*”,

¹⁶Hardani, Dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020). hal 103.

¹⁷*Ibid.* hal 104.

karangan Buya Hamka namun di terbitkan ulang dengan penyempurnaan dari H. Syed Ahmad Semait yang diterbitkan dan dimuat ulang oleh orang lain.

2. Tahapan Verifikasi (Kritik Sumber)

Tahap selanjutnya yaitu verifikasi atau kritik sumber, terkait hasil pengumpulan sumber-sumber tadi, peneliti akan terlebih dahulu menilainya melalui dua metode, yaitu kritik eksternal dan kritik internal untuk menentukan otentisitas dan kredibilitas sumber-sumber tersebut.

a. Kritik ekstern

Kritik ekstern ini dilakukan pada ke aslian atau ke autentikan suatu bahan yang digunakan dalam pembuatan sumber sejarah, misalnya prasasti, naskah, dan dokumen. Pada tahap kritik ekstern ini peneliti memfokuskan pada bahan yang digunakan dalam pembuatan sumber sejarah, waktu pembuatannya, juga mengetahui jenis tinta yang digunakan guna mengetahui berapa usia dari sumber data yang ditemukan, sehingga membuat sumber sejarah yang didapatkan ini relevan dan dapat dipertanggung jawabkan.

b. Kritik intern

Kritik intern merupakan penilaian keakuratan atau ke autentik terhadap materi sumber sejarah itu sendiri. Di dalam proses analisis terhadap suatu dokumen sejarawan harus selalu memikirkan unsur-unsur yang relevan di dalam dokumen itu. sendiri secara menyeluruh. Unsur dalam dokumen dianggap relevan apabila unsur tersebut paling dekat dengan apa yang telah terjadi, sejauh dapat diketahui

berdasarkan suatu penyelidikan kritis terhadap sumber-sumber terbaik yang ada.¹⁸

3. Tahapan Interpretasi

Selanjutnya yaitu Interpretasi atau penafsiran sejarah seringkali disebut sebagai analisis sejarah. Dengan metode ini peneliti akan menganalisis dan menguraikan hasil penelitian, dan secara terminologi berarti menyatukan. Seorang peneliti harus berusaha mencapai pengertian factor-faktor yang menyebabkan terjadinya peristiwa. Interpretasi juga dapat dilakukan dengan cara membandingkan data guna menyikapi peristiwa-peristiwa mana yang terjadi dalam waktu yang sama.

Para ahli sejarah membebaskan penggunaan apa saja dari bentuk dalam metode interpretasi yang logis untuk mencapai tujuannya. Meskipun dalam kalangan sejarawan modern kecenderungannya terhadap interpretasi pluralis lebih diutamakan, karena mereka beranggapan bahwa kemajuan studi sejarah dapat didorong pula oleh kemajuan ilmu pengetahuan lainnya.¹⁹

Setelah melewati tahapan kritik sumber peneliti melakukan tafsiran atas dasar sumber-sumber yang paling banyak disebutkan terkait tema ini, serta peneliti membandingkan data yang sudah didapat dan memilih yang paling relevan dan kredibel.

4. Tahapan Historiografi (Penulisan Sejarah)

Tahapan Historiografi merupakan puncak dan tahapan terakhir yang harus dilalui oleh para sejarawan atau penulis kisah sejarah yang berpedoman pada metode penelitian keilmuan sejarah. Secara mendasar historiografi di artikan sebagai sebuah

¹⁸ Anwar Sanusi, *Pengantar Ilmu Sejarah*. (Cirebon: Syekh Nurjati Press, 2013), hal 138.

¹⁹ *Ibid*, hal. 116.

penulisan, penulisan kisah atau peristiwa pada konteks suatu masa tertentu atas tahapan-tahapan yang dilalui sebelumnya, mulai dari heuristic atau pencarian akan sumber-sumber, kritik yang dapat diartikan sebagai pemilahan atas sumber-sumber yang sudah didapatkan tersebut, yang sekiranya representative untuk dijadikan sebagai sebuah bahan tulisan, serta interpretasi yang dalam hematnya dapat diartikan sebagai penafsiran atas suatu kejadian berdasarkan pada sumber-sumber yang sudah tersedia yang sudah melewati tahap kritik sebelumnya dan selanjutnya melakukan analisis terhadap data yang diperoleh penulis maka langkah selanjutnya adalah melakukan penulisan atau pemaparan secara utuh dan sistematis atas gagasan H. Abdul Malik Karim Amrullah (Buya Hamka) tentang hubungan Agama dan Negara Tahun 1927-1981.²⁰

Oleh karena itu, pada tahapan ini pula, peneliti atau sejarawan disadarkan bahwa tulisannya yang merupakan hasil penelitiannya tersebut bukan semata-mata untuk kepentingan dirinya, tetapi untuk pengetahuan para pembaca tulisan tersebut.

H. Sistematika Penelitian

Dalam pembahasan ini akan dijabarkan lebih lanjut mengenai pembagian bab-bab yang sesuai dengan alur diakronisnya untuk mempermudah pembaca dan agar lebih terperinci. Sehingga terungkap akan Konsep Agama Dan Negara Menurut Haji Abdul Karim Amrullah (Buya Hamka). Pembagian permasalahan ini dijabarkan dalam lima bab, dengan tujuan untuk

²⁰ Aditia Muara Padiatra, *Ilmu Sejarah: Metode dan Praktik* (Gresik: CV. Jendela Sastra Indonesia Press, 2020), hal 92-93.

mengetahui kronologi penelitian dan memfokuskan penelitian yang dibahas, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I, merupakan pendahuluan yang di dalamnya diuraikan beberapa masalah pokok penelitian, yang meliputi: latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bagian ini merupaakn gambaran umum tentang seluruh rangkaian penulisan skripsi sebagai dasar pijakan dalam pembahasan selanjutnya.

Bab II, membahas terkait dengan gambaran umum tentang gagasan Agama dan Negara. Dalam bab ini akan diawali dengan pembahasan umum mengenai makna Agama dan Negara menurut istilah, bahasa, menurut para tokoh dan menurut sejarahnya.

Bab III, mendeskripsikan tentang biografi Buya Hamka. Dalam bab ini akan membahas tentang biografi Buya Hamka, meliputi latar belakang keluarga, Pendidikan, karier, pemikiran dan wafatnya Buya Hamka.

Bab IV, mendeskripsikan tentang Gagasan Agama dan Negara menurut Buya Hamka. Dalam bab ini akan membahas pengertian Agama dan Negara menurut Buya Hamka, dan bagaimana hubungannya.

Bab V, merupakan bab penutup. Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang dikaji, dan berisi saran-saran yang berguna untuk penelitian selanjutnya.